

INDONESIA KITA (II)

Oleh Nurcholish Madjid

Presiden Suharto (Jenderal Purnawirawan TNI) pengganti Presiden Sukarno, adalah seorang pribadi yang secara unik merupakan gabungan antara penampilan lahiriah yang lembut, hampir malu-malu, dengan sikap batin dan kemauan yang keras, hampir-hampir tidak kenal kompromi. Pak Harto menghela bangsa Indonesia keluar dari kepengapan sistem “Orde Lama” yang menyesak napas, menuju sistem “Orde Baru” yang menjanjikan perbaikan. Namun sayang, ternyata Pak Harto adalah campuran aneh antara segi-segi amat positif dan segi-segi amat negatif. Ia cukup rendah hati untuk menyadari dan mengakui bahwa ia tidak akan mengetahui segala-galanya berkenaan dengan kehidupan kenegaraan, khususnya perpolitikan dan perekonomian. Maka ia mengelilingi dirinya dengan sekelompok tenaga ahli yang merupakan golongan terdidik terbaik pada masa itu. Ia juga tampak sebagai orang yang suka belajar dan kecerdasan alamiahnya menjadikannya seorang yang cepat mengerti dan menguasai persoalan.

Kecerdasan alamiah Pak Harto itu juga membuatnya menjadi seorang ahli taktik dan strategi yang sangat piawai. Hal itu dibuktikan oleh kemampuannya bertahan dalam kekuasaan selama lebih dari 30 tahun, tanpa gejolak gawat seperti yang dialami Presiden Sukarno selama enam tahun setelah Dekrit 5 Juli 1959. Tetapi, berbarengan dengan itu, sisi-sisi mencemaskan dari Pak Harto juga menyembul ke permukaan. Jiwa dan gaya kemiliterannya tetap bertahan dalam suasana tanggung jawab pemerintahan sipil

— jiwa kemiliteran yang pernah membuatnya sukses besar dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan sebelumnya.

Lemahnya Wawasan tentang “Nation-State”

Pak Harto agaknya kurang menghayati berbagai keharusan sebuah *modern nation-state* sebagaimana didambakan para *founding fathers*. Yaitu, keharusan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* untuk menghasilkan *clean government* (sehingga praktik-praktik KKN yang sangat terkutuk itu dapat tercegah), juga prinsip-prinsip melindungi kebebasan-kebebasan sipil, membela hak-hak asasi manusia, menegakkan kedaulatan hukum, memperhatikan dengan sungguh-sungguh pendidikan untuk seluruh warga negara di semua pelosok wilayah, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Suatu ironi besar pada Pak Harto, bahwa ia sedemikian kuat menyatakan diri dan sistemnya terikat dengan nilai-nilai Pancasila, namun ekspresi komitmennya kepada nilai-nilai itu hanya menghasilkan gejala verbalisme — yaitu gejala perasaan telah berbuat karena telah sering mengucapkan dan membicarakannya. Sementara itu, kehidupan sehari-hari marak dengan contoh-contoh tindakan dan perilaku yang bertentangan dengan salah satu atau mungkin malah semua dari prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.

Demikian pula berkenaan dengan paham kemajemukan atau pluralisme. Sadar atau tidak, Pak Harto, sama dengan Bung Karno, menunjukkan ketidaksetiaan asas atau inkonsistensi yang mencemaskan. Selain tentang Pancasila, Pak Harto juga sangat rajin mengingatkan kita semua tentang prinsip *Bhinneka Tunggal Ika*. Tetapi dalam banyak tindakan nyata, Pak Harto menunjukkan keinginan kuat untuk menyeragamkan kehidupan nasional, khususnya di bidang politik dan pemerintahan. Sistem-sistem pemerintahan daerah berangsur-angsur digiring untuk

menerapkan sistem yang seragam, mengikuti model pemerintahan di Jawa.

Tentang Paham Kemajemukan

Di atas semuanya itu, sikap Pak Harto dan sistemnya yang menunjukkan kurangnya konsistensi berkenaan dengan paham kemajemukan, ialah penolakannya yang keras dan kategorikal terhadap ide tentang perlunya oposisi resmi terhadap pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Bagi yang sempat berusaha memahami lebih mendalam, ungkapan *Bhinneka Tunggal Ika* gubahan Empu Tantular itu dimaksudkan sebagai pengakuan positif kepada keanekaragaman orientasi keagamaan dalam masyarakat, karena hakikat dan tujuan semuanya itu satu dan sama, yaitu berbakti kepada Tuhan Yang Mahaesa dan berbuat baik kepada sesama makhluk: *Tan Hana Dharma Mangroa*, tidak ada jalan kebaikan yang mendua dalam tujuan.

Transformasi pandangan dasar itu ke bidang politik mengharuskan masyarakat untuk menerima secara positif adanya perbedaan orientasi politik, yang juga berarti harus tersedia ruang bagi kegiatan oposisi. Demokrasi menuntut adanya pandangan ini pada setiap pribadi, lebih-lebih pada setiap pribadi para pemimpin, suatu pandangan yang selaras dengan keharusan berendah hati sehingga mampu melihat diri sendiri berkemungkinan salah, dan orang lain yang berbeda dengan dirinya berkemungkinan benar. Demokrasi tidak mungkin disertai dengan absolutisme dan sikap-sikap mau benar sendiri lainnya. Demokrasi mengharuskan adanya sikap saling percaya (*mutual trust*) dan saling menghargai (*mutual respect*) antara sesama warga masyarakat. Di bawah pertimbangan tujuan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan umum, demokrasi tidak membenarkan adanya sikap *all or nothing* (semua, atau tidak), *take it or leave it* (ambil, atau tinggalkan), yaitu sikap-sikap serba kemutlak-mutlakan. Sebaliknya, seperti dalam kaedah fiqih Islam

(ushul fikih), yang berlaku ialah “yang tidak semua bisa didapat tidak semua harus ditinggalkan”. Maka demokrasi memerlukan adanya kesediaan setiap pesertanya untuk menerima kenyataan bahwa keinginan seseorang tidak mungkin seluruhnya diterima oleh semua orang dan dilaksanakan, melainkan hanya sebagian saja. Sebab salah satu segi asasi demokrasi ialah “*partial functioning of ideas*”, “berlakunya hanya sebagian dari ide-ide”, karena selebihnya datang dari orang lain sesama peserta demokrasi.

Karena itu demokrasi juga menuntut adanya kesediaan dari pihak-pihak yang bersangkutan untuk kemungkinan terjadinya kompromi atas dasar pertimbangan prinsipil, bukan karena oportunisme. Semuanya itu merupakan inti dan semangat sebenarnya ungkapan *Bhinneka Tunggal Ika* dan *Tan Hana Dharma Mangroa*. Maka budaya-budaya daerah harus ditempatkan dengan penuh penghargaan begitu rupa sehingga tetap memperoleh pengakuan yang sah sebagai bentuk-bentuk kearifan lokal yang memperkaya budaya dan kearifan nasional. Dengan demikian, prinsip *Bhinneka Tunggal Ika* mendorong berlangsungnya *cultural cross fertilization*, penyuburan silang budaya, guna menghasilkan budaya nasional hibrida yang lebih unggul dan lebih tangguh. Usaha penyeragaman, seperti biasanya dicoba lakukan oleh penguasa totaliter, bertentangan diametral dengan prinsip amat mendasar dalam kehidupan bernegara kita yang adil, terbuka, dan demokratis.

Tentang Pembangunan Fisik Ekonomi

Kembali kepada soal Pak Harto, dengan bantuan penuh kaum teknokrat, khususnya para ahli ekonomi anggota “*Berkeley Mafia*”, telah berhasil menaikkan taraf hidup rata-rata bangsa Indonesia ke tingkat yang jauh lebih tinggi daripada masa “Orde Lama”, suatu hasil kerja yang sama sekali tidak mungkin dapat diabaikan atau diingkari. Tetapi, sebagaimana disiratkan dalam salah satu bait lagu kebangsaan Indonesia Raya, Pak Harto dan Orde Baru baru

menyentuh bagian “bangunlah badannya”, belum menyentuh bagian “bangunlah jiwanya”. Dengan meningkatkan taraf hidup rata-rata, Pak Harto telah membangun sisi badan lahir atau *wadang* bangsa. Tetapi dengan tidak memberi perhatian memadai kepada keharusan-keharusan sebuah *modern nation-state* atau nasionalisme yang terbuka dan egaliter partisipatif, sengaja atau tidak Pak Harto telah menelantarkan pembangunan sisi jiwa batin bangsa. Padahal, menurut kearifan dalam lagu kebangsaan, sisi batin adalah primer, sedangkan sisi lahir adalah sekunder. Membangun sisi jiwa akan berimbas positif kepada pembangunan sisi badan, suatu imbas yang lebih besar dan lebih positif daripada imbas pembangunan sisi badan kepada sisi jiwa. Ketimpangan antara yang lahir dan yang batin dan tiadanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat menyalahi prinsip-prinsip tatanan hidup manusia yang benar, dan akan membawa kesulitan besar kepada suatu bangsa. Itulah, dengan meminjam ungkapan Bung Karno, hukum besi sejarah umat manusia. Bung Karno telah tertimpa hukum besi itu, dan selang sekitar 30 tahun sesudahnya, hukum yang sama menimpa Pak Harto. Kita harus menarik pelajaran dari semua itu.

Mengacu kepada drama kosmis dalam Kitab Suci, sesungguhnya tidak ada apa yang dinamakan “pohon khuldi” (*syajarat al-khuld*), yaitu pohon kehidupan abadi di dunia; juga tidak ada pohon kekuasaan yang tidak bakal runtuh (*mulk-un lâ yablâ*). Pohon serupa itu hanya ada dalam keterangan palsu setan tentang pohon terlarang di Surga. Dengan keterangannya itu setan berhasil menggoda Adam dan Hawa, sehingga keduanya melanggar pesan Tuhan untuk tidak mendekati pohon terlarang, dan memakan buah pohon itu. Akibatnya, Adam dan Hawa diusir Tuhan turun dari Surga. Nafsu untuk hidup abadi yang kemudian mendorong orang untuk menumpuk kekayaan “tujuh turunan” dan ambisi untuk memperoleh kekuasaan dan berkuasa selama-lamanya demi kekuasaan itu sendiri adalah perbuatan “memakan buah pohon hidup abadi dan kekuasaan selama-lamanya” seperti dibisikkan setan, dan melanggar pesan Tuhan jangan mendekati pohon

terlarang. Pelanggaran itu pasti akan berakhir dengan kenistaan. Sejarah umat manusia banyak menyaksikan pelanggaran serupa itu, dengan akibat runtuhnya rezim-rezim, dinasti-dinasti, dan bangsa-bangsa. Sebab semuanya itu akan menjerumuskan masyarakat kepada kemerosotan moral. Kemerosotan moral dengan gejala gaya mewah berlebihan itulah penyebab utama hancurnya negara. Sejarawan Edward Gibbon (1734-1794) juga menggunakan pandangan itu untuk menerangkan sebab-sebab runtuhnya Kekaisaran Romawi, dalam karya klasiknya, *The History of the Decline and Fall of the Roman Empire*.^[❖]